



Ringkasan bagi Pembuat Kebijakan

Kejahatan Terorganisir di Sektor Perikanan

Seperti kebanyakan sektor ekonomi, sektor perikanan terpapar kejahatan terorganisir pada skala global. Pelanggaran pidana dapat terjadi di seluruh rantai nilai perikanan dari tahap persiapan (termasuk asuransi dan registrasi kapal) hingga kegiatan-kegiatan di laut (termasuk dokumen pemanenan dan hasil tangkapan) untuk mendaratkan, memproses, mentransportasikan, memperdagangkan, dan menjual—meliputi penipuan dan pemalsuan dokumen, pencucian uang, serta perdagangan narkoba dan manusia (Gambar 1).

Kejahatan terorganisir di sektor perikanan memiliki banyak dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial yang merugikan, yang merongrong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan upaya ekonomi laut berkelanjutan. Dampak ini meliputi mengancam keamanan makanan, melemahkan komunitas perikanan yang rentan, mengurangi basis pendapatan negara-negara pesisir, serta merusak ekosistem dan lingkungan laut.

Mengidentifikasi, menginvestigasi, dan menuntut dengan sukses kejahatan terorganisir di sektor perikanan menghadirkan beberapa tantangan. Tantangan ini mencakup rendahnya prioritas nasional terhadap kejahatan terorganisir di sektor perikanan pada tingkat politik dan operasional; kurangnya koordinasi di antara beberapa departemen dan lembaga pemerintah secara nasional, regional, dan transnasional; tidak memadainya kerangka kerja legislatif pidana; kurangnya kejelasan yurisdiksi di laut dan yurisdiksi ekstrateritorial; kurangnya penindakan di laut; lemahnya lembaga penegak hukum dan kapasitas peradilan pidana, khususnya dalam investigasi keuangan; dan kurangnya transparansi di sektor perikanan dan keuangan.

Sebuah dokumen baru, yang diotorisasi oleh Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan¹, merangkum kondisi pengetahuan tentang kejahatan terorganisir di sektor perikanan dan cara kejahatan tersebut dapat mengganggu kemampuan kita untuk mencapai ekonomi laut berkelanjutan. Dokumen itu mengambil praktik terbaik di seluruh dunia guna menyajikan peluang-peluang untuk mengatasi kejahatan terorganisir di sektor perikanan, menekankan perlunya pemahaman bersama terhadap masalah itu secara global, dan

Gambar 1. Manifestasi Kejahatan Terorganisir di Sektor Perikanan



Source: Designed by Ines Aguiar Branco.

pelaksanaan tindakan kerja sama penegakan hukum yang diarahkan oleh intelijen dan berbasis keterampilan yang difasilitasi dengan memungkinkan kerangka kerja legislatif dan peningkatan transparansi.

Berbagai negara sebagian besar belum mengetahui solusi yang paling sesuai dan rezim hukum yang berlaku untuk mengatasi kejahatan terorganisir di sektor perikanan, dan bagaimana hal tersebut berbeda dari (namun melengkapi) tindakan yang ditujukan untuk mengatasi tantangan-tantangan pengelolaan perikanan. Kurangnya pembedaan ini di antara masalah kejahatan terorganisir dalam perikanan (pada hakikatnya merupakan masalah keamanan dan penegakan hukum) dan penangkapan ikan yang ilegal, tidak diregulasi, dan tidak dilaporkan (pada hakikatnya merupakan masalah praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan) dapat mengarahkan berbagai negara untuk mengambil keputusan-keputusan yang kurang matang mengenai pendekatan yang paling sesuai untuk mengatasi kedua tantangan ini.

Pertama, pemahaman yang sama tentang kejahatan terorganisir transnasional di sektor perikanan pada tingkat global, ditambah dengan kemauan politik yang dapat dibuktikan untuk mengatasi tantangan itu secara kooperatif, diperlukan.

Kedua, berbagai negara harus mengembangkan alat bantu praktis untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum:



Memperkuat kerja sama antarlembaga nasional



Kerja sama penegakan hukum lintas negara yang efektif



Mengaktifkan berbagai kerangka kerja hukum



Pelatihan keterampilan dan pembangunan kapasitas



Strategi-strategi pencegahan kejahatan berbasis masyarakat yang menyertakan pendekatan gender



Keterlibatan masyarakat sipil



Dukungan penelitian yang relevan



Peluang-Peluang Untuk Bertindak

Dokumen tersebut mengusulkan 12 tindakan yang dibagi dalam dua tahap pelaksanaan:

TAHAP PERTAMA: MENGEMBANGKAN PEMAHAMAN BERSAMA TENTANG KEJAHATAN TERORGANISIR TRANSNASIONAL DI BIDANG PERIKANAN

1. Semua negara harus melapor ke Majelis Umum PBB dalam menanggapi seruan yang dibuat oleh Resolusi Majelis Umum PBB 63/112 untuk memeriksa hubungan di antara penangkapan ikan ilegal dan kejahatan terorganisir di bidang perikanan. Upaya ini akan memfasilitasi pembentukan platform pengetahuan yang solid tentang manifestasi kejahatan terorganisir di bidang perikanan yang dialami di seluruh dunia.
2. Anggota-anggota Dewan Keamanan PBB harus meningkatkan implikasi-implikasi keamanan terhadap kejahatan terorganisir transnasional di bidang perikanan untuk mendorong pengembangan pemahaman bersama tentang dimensi keamanan masalah tersebut.
3. Semua negara harus mendukung secara formal Deklarasi Internasional melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional dalam Industri Perikanan Global 2018. Dukungan luas bagi deklarasi ini merupakan langkah penting untuk mengembangkan pemahaman bersama dan kesadaran akan masalah kejahatan terorganisir di bidang perikanan serta membangun kemauan politik untuk mengatasinya dengan lebih penuh semangat, yang pada gilirannya akan memfasilitasi pencapaian SDG.
4. Semua negara setiap tahunnya harus melaporkan kejahatan terorganisir transnasional di bidang perikanan ke Komisi PBB untuk Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana guna memastikan perhatian yang meluas dan berkelanjutan terhadap masalah itu.
5. Semua negara harus berpartisipasi dalam forum berbagi pengetahuan internasional secara berkala untuk membagikan informasi, dan membahas tantangan-tantangan dan peluang-peluang yang timbul dari, kasus kejahatan perikanan terorganisir transnasional di seluruh dunia.

TAHAP DUA: MENGEMBANGKAN ALAT BANTU PRAKTIS UNTUK MEMPERKUAT KAPASITAS PENEGAKAN HUKUM GUNA MENGATASI KEJAHATAN TERORGANISIR DALAM INDUSTRI PERIKANAN

1. Semua pemerintah harus memperkuat kerja sama antarlembaga nasional untuk mengatasi kejahatan terorganisir di sektor perikanan. Kami merekomendasikan agar berbagai negara memperkenalkan model antarlembaga nasional untuk memfasilitasi dan mendukung upaya penegakan hukum pidana yang terkoordinasi guna mencegah kejahatan terorganisir di sektor perikanan dan mengidentifikasi serta menuntut pelaku kejahatan.
2. Semua pemerintah harus memperkuat upaya kerja sama penegakan hukum lintas negara untuk mengidentifikasi, menginvestigasi, dan menuntut kasus kejahatan perikanan terorganisir transnasional, termasuk melalui bantuan hukum timbal balik. Kami menyarankan agar alat bantu yang tersedia melalui jaringan dan organisasi internasional dan regional, seperti mekanisme berbagi informasi dan analisis multilateral, digunakan untuk mengakhiri masalah ini, serta platform untuk pertukaran intelijen keuangan yang aman, dan agar basis data yang ada tentang kejahatan terorganisir dapat ditingkatkan dengan menyertakan perikanan.

3. Semua negara harus meninjau berbagai kerangka kerja hukum mereka dan menerapkan reformasi jika diperlukan. Tujuannya adalah untuk mengkriminalisasi dan menyertakan hukuman yang cukup memberikan efek jera terhadap semua pelanggaran kejahatan perikanan, memperkenalkan tindakan antikorupsi dan antipencucian uang serta membuat ketentuan untuk pemulihan aset dan perampasan hasil tindak kejahatan. Kami menyarankan agar berbagai negara memberikan penerapan ekstrateritorial dan ekstrajudisial terhadap hukum terkait (sebagai contoh, melalui undang-undang jenis Lacey) dan untuk pertanggungjawaban pidana korporat.
 4. Semua negara harus terlibat dalam pelatihan keterampilan dan pembangunan kapasitas bagi pejabat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana mulai dari di laut hingga persidangan. Ini harus mencakup pengembangan keterampilan seputar investigasi keuangan dan pemulihan aset serta kapasitas untuk mendeteksi kejahatan pajak di sektor perikanan. Skema pembimbingan dapat bermanfaat dalam hal ini.
 5. Semua negara harus memperkenalkan strategi-strategi pencegahan kejahatan berbasis masyarakat sebagaimana mestinya. Ini akan memperkuat ketahanan masyarakat pantai yang rentan dan kemampuan mereka untuk merespons kejahatan perikanan yang terorganisasi.
 6. Masyarakat sipil harus terlibat dengan industri perikanan tentang tanggung jawab sosial perusahaan untuk praktik perikanan yang berkelanjutan. Ini dapat membantu meminimalkan risiko kegiatan-kegiatan kriminal dalam rantai pasokan dan nilai perikanan.
 7. Semua negara harus mendukung penelitian untuk memahami penyebab, sifat, skala, dan dampak kejahatan terorganisir dalam perikanan. Hasil penelitian harus tersedia untuk umum karena dapat menginformasikan pengembangan cara yang tepat untuk mencegah kejahatan terorganisir di bidang perikanan dan memperkuat tanggapan penegakan hukum.
-

Secara keseluruhan tindakan ini dapat mencapai dua keharusan: (1) pengakuan universal terhadap adanya kejahatan terorganisir di sektor tersebut dan implikasi-implikasi sosial-ekonomi, lingkungan, dan keamanan merugikan yang dimilikinya, dan (2) peningkatan kerja sama penegakan hukum kejahatan perikanan antarlembaga dan lintas batas yang efektif. Pencapaian keharusan ini dapat mengurangi secara signifikan kejahatan terorganisir global di sektor perikanan dan memajukan upaya untuk mencapai ekonomi laut berkelanjutan yang sesungguhnya.

Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan (Panel Samudra) adalah sebuah inisiatif unik dari 14 pemimpin dunia yang sedang membangun momentum menuju ekonomi laut yang berkelanjutan, di mana perlindungan efektif, produksi berkelanjutan, dan kemakmuran yang adil berjalan lancar.

Dipimpin bersama oleh Norwegia dan Palau, Panel Samudra mencakup sejumlah anggota dari Australia, Kanada, Chili, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaika, Jepang, Kenya, Meksiko, Namibia, Norwegia, Palau, dan Portugal dan didukung oleh Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Samudra.

Panel Samudra mengumpulkan masukan dari berbagai macam pemangku kepentingan, termasuk Grup Ahli dan Jaringan Penasihat. Sekretariat, yang berbasis di World Resources Institute, membantu pekerjaan analitis, komunikasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Blue Paper yang dirangkum laporan singkat ini merupakan masukan independen untuk proses Panel Samudra dan tidak mewakili pemikiran Panel Samudra, Petugas, ataupun Sekretariat.

Untuk informasi selengkapnya, termasuk laporan lengkap, kunjungi www.oceanpanel.org.

1 Witbooi, E., K.-D. Ali, M.A. Santosa et al. 2020. *Organised Crime in the Fisheries Sector*. Washington, DC: World Resources Institute. www.oceanpanel.org/blue-papers/organised-crime-associated-fisheries.